

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan salah satu bentuk sistem pengelolaan hutan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan deforestasi dan kerusakan hutan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Melalui skema ini, masyarakat diberikan hak untuk mengelola hutan negara berdasarkan prinsip keberlanjutan, yang menekankan pada pentingnya menjaga keseimbangan ekologis serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan bagi masyarakat lokal (Lucky dkk, 2025). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya pelestarian hutan, dengan mengakui bahwa ketergantungan mereka secara langsung terhadap sumber daya hutan menjadikan mereka sebagai pemangku kepentingan yang vital dalam kegiatan konservasi (Pambudi, 2020). Meskipun telah diimplementasikan selama lebih dari satu dekade dan mencakup areal yang signifikan, efektivitas program HKm dalam mencapai tujuan ganda, yaitu peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan pelestarian ekologis hutan, masih menjadi topik perdebatan dan evaluasi yang berkelanjutan (Oktoyoki dkk. 2023).

Hutan Kemasyarakatan memberikan hak pengelolaan hutan negara kepada masyarakat untuk dikelola secara berkelanjutan, dengan tujuan tidak hanya memanfaatkan hasil hutan kayu, tetapi juga hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Christmas dkk., 2021). Konsep ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan agroforestri dan pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam yang ada, seperti produk hutan dan pariwisata alam (Widiarta dkk., 2023). Dalam konteks ekonomi, HKm diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, ketahanan pangan, dan diversifikasi mata pencaharian (Harun, 2024).

Meskipun Hutan Kemasyarakatan (HKm) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah minimnya dukungan konkret dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, baik dalam bentuk regulasi yang berpihak



pendampingan teknis, maupun akses terhadap pembiayaan. Selain itu, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, hal pengetahuan, keterampilan teknis, dan pengalaman pengelolaan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan, turut signifikan dalam mencapai tujuan program ini (Muttaqin, 2021). Mengatakan pentingnya upaya penguatan kapasitas kelembagaan

masyarakat serta peningkatan keterlibatan aktif mereka dalam seluruh tahapan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan hutan. Dengan demikian, pengelolaan HKM tidak hanya menjadi program formalitas semata, tetapi benar-benar menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis secara berkelanjutan.

Persepsi dan preferensi masyarakat terhadap pengelolaan hutan memainkan peran penting dalam keberhasilan HKM. Persepsi yang positif terhadap manfaat hutan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pengelolaan dan konservasi hutan (Afitah dan Purnama, 2021). Masyarakat dengan pengetahuan yang memadai tentang fungsi dan manfaat hutan cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap HKM, sehingga lebih mendukung pelaksanaannya (Afitah & Purnama 2021).

Berbagai faktor memengaruhi persepsi masyarakat terhadap Hutan Kemasyarakatan (HKM), termasuk tingkat pendidikan, pemahaman mengenai manfaat hutan, serta pengalaman langsung dalam pengelolaannya (Martapani dkk., 2021). Selain itu, program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat (Zamrodah & Prayudhi, 2024). Ketika masyarakat merasa terlibat serta memahami manfaat nyata dari program HKM, mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan menjaga kelestariannya (Basir dkk., 2020).

Preferensi masyarakat terhadap HKM dipengaruhi oleh aspek ekonomi dan sosial. Dampak positif, seperti peningkatan pendapatan dari kegiatan agroforestri atau budidaya tanaman, mendorong masyarakat untuk mendukung program ini (Martapani dkk., 2021). Hutan kemasyarakatan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga memperkuat hubungan sosial melalui kerja sama dan kolaborasi dalam pengelolaan hutan (Basir dkk., 2020). Dengan demikian, persepsi positif masyarakat berhubungan erat dengan preferensi mereka terhadap program yang melibatkan partisipasi aktif, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan sumber daya hutan (Haryani & Rijanta, 2019).

Di Desa Pundau, program Hutan Kemasyarakatan mencakup area seluas 750 hektar yang dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Pundau Sipatuo sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.30/Menhut-II/2015 tanggal 23 Januari 2015. Namun, dinamika pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas pengelolaan yang berkelanjutan, terutama jika persepsi dan preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo belum sepenuhnya dipahami dan diakomodasi. Selain itu, keberhasilan HKM juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal



yang mungkin mendukung atau menghambat, seperti pengelolaan kelembagaan, pengelolaan usaha, dan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian, yaitu: (1) bagaimana persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap Desa Pundau; (2) bagaimana preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKM; serta (3) apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan HKM di desa tersebut. Melalui

pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis dalam memperkaya literatur pengelolaan hutan berbasis masyarakat, maupun secara praktis dalam merumuskan strategi dan kebijakan pengelolaan HKm yang lebih partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari uraian di atas sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?
- 1.2.2 Bagaimana preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm di Desa Pundau Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?
- 1.2.3 Apa faktor penghambat dan pendukung HKm di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- 1.3.1 Menganalisis persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- 1.3.2 Menganalisis preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap Pengelolaan HKm di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
- 1.3.3 Menganalisis faktor penghambat dan pendukung HKm di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan literatur terkait pengelolaan hutan berbasis masyarakat, khususnya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Penelitian ini juga memiliki manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah (NGO), dan masyarakat lokal.

## 1.5 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebagai objek utama kajian. Tiga fokus utama penelitian adalah persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap manfaat keberadaan HKm, dan preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam



laan HKm.

Anggota KTH Pundau Sipatuo mencerminkan bagaimana mereka melihat manfaat dari HKm, yang dikategorikan ke dalam tiga dimensi, yaitu manfaat sosial, dan manfaat ekologi. Sementara itu, preferensi anggota Sipatuo merepresentasikan kecenderungan atau pilihan mereka terhadap pengelolaan HKm yang ideal, yang ditinjau melalui model

pengelolaan yang diinginkan (seperti agroforestri, ekowisata, atau konservasi) dan tujuan manfaat (ekonomi, sosial, atau lingkungan).

Selain mengukur persepsi dan preferensi, penelitian ini secara khusus mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan HKM di tingkat tapak. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, dilakukan wawancara mendalam kepada informan kunci berdasarkan indikator resmi dari Peraturan Kepala BP2SDM No. P.5/P2SDM/SET/KUM.1/7/2020, yang meliputi aspek kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Persepsi dan preferensi dianalisis secara deskriptif menggunakan skala Likert. Sedangkan analisis terhadap faktor pendukung dan penghambat dilakukan dengan menggunakan *Force Field Analysis* (FFA) dan SWOT.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi persepsi dan preferensi masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang perlu diperkuat atau diperbaiki. Dengan demikian, pengelolaan HKM dapat diarahkan secara lebih berkelanjutan, adaptif, dan partisipatif sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat Desa Pundau. Diagram alir kerangka pikir penelitian dalam dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian



## BAB II

### PERSEPSI DAN PREFERENSI ANGGOTA KELOMPOK TANI HUTAN PUNDAU SIPATUO TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN

#### 2.1 Abstrak

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak hanya dipahami sebagai upaya konservasi sumber daya hutan, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan ekonomi, penguatan sosial, dan perlindungan ekologi. Keberhasilan pengelolaan HKm sangat dipengaruhi oleh persepsi dan preferensi masyarakat sebagai pelaku utama di tingkat tapak. Bab ini menganalisis persepsi dan preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm di Desa Pundau yang ditinjau dari dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Analisis dilakukan melalui pengukuran persepsi dan preferensi menggunakan indikator terstruktur untuk menggambarkan tingkat penerimaan, keterlibatan, serta arah pilihan pengelolaan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa persepsi anggota KTH terhadap pengelolaan HKm berada pada kategori sedang hingga baik, dengan manfaat ekonomi sebagai aspek yang paling dominan dirasakan, terutama dalam peningkatan pendapatan dan akses pasar hasil hutan. Pada dimensi sosial, partisipasi, gotong royong, dan peran kelembagaan lokal telah terbentuk, meskipun belum sepenuhnya merata pada aspek pengambilan keputusan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Pada dimensi ekologi, kesadaran dan partisipasi pelestarian berada pada kategori cukup baik, namun masih didominasi oleh keterlibatan kolektif dibandingkan inisiatif individu. Preferensi masyarakat menunjukkan kesepahaman yang sangat kuat terhadap model pengelolaan agroforestri–agrosilvopastura dan tujuan manfaat ekonomi sebagai prioritas utama pengelolaan HKm.

#### 2.2 Pendahuluan

Keberhasilan program Hutan Kemasyarakatan (HKm) tidak semata ditentukan oleh aspek kebijakan dan struktur kelembagaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara masyarakat—sebagai aktor utama—memahami serta merespons proses pengelolaan hutan (Pambudi, 2020). Dalam kerangka tersebut, persepsi dan preferensi masyarakat menjadi elemen penting yang mencerminkan tingkat penerimaan, bentuk partisipasi, serta orientasi keterlibatan mereka dalam HKm (Mukhtiya dkk, 2023).



menggambarkan bagaimana masyarakat menilai dimensi ekonomi, s; dari pengelolaan hutan (Zamrodah & Prayudhi, 2024), i menunjukkan kecenderungan pilihan mereka terhadap model, ah kebijakan HKm yang dipandang paling sesuai dengan lisi lokal (Harun, 2024). Kajian terhadap kedua variabel ini secara komprehensif untuk memastikan adanya keselarasan



Kemasyarakatan di Kecamatan Sendana Desa Pundau yang menjadi anggota KTH Pundau Sipatuo, Kabupaten Majene.

Data yang diambil berupa data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian dan menjadi data utama dalam penelitian ini. Data sekunder yang diperoleh dari studi literatur sebagai data dasar dan penunjang penelitian. Lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis, Indikator, Data, dan sumber data

No	Jenis	Indikator	Data	Sumber Data
1	Primer	Karakteristik Responden	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umur responden</li> <li>- Jenis kelamin responden</li> <li>- Tingkat pendidikan terakhir responden</li> <li>- Jenis pekerjaan atau mata pencaharian responden</li> </ul>	Wawancara dan Kuesioner
2	Primer	Persepsi terhadap Manfaat Ekonomi (Zamrodah dkk., 2024)	Data tentang peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan kerja, akses pasar hasil hutan, dan akses finansial	Wawancara, dan kuesioner
3	Primer	Persepsi terhadap Manfaat Sosial (Zamrodah dkk., 2024)	Data tentang partisipasi sosial, gotong royong, dan penguatan kelembagaan lokal	Wawancara, dan kuesioner
4	Primer	Persepsi terhadap Ekologi (Zamrodah dkk., 2024)	Data tentang kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan partisipasi dalam pelestarian hutan	Wawancara, dan kuesioner
5	Primer	Preferensi terhadap Model Pengelolaan	Data tentang bentuk pengelolaan yang disukai seperti agroforestri, konservasi, atau ekowisata	Wawancara, dan kuesioner
6	Primer	Preferensi terhadap tujuan manfaat	Data tentang alasan utama masyarakat terlibat dalam HKM: ekonomi, sosial, atau lingkungan	Wawancara, dan kuesioner
7	Sekunder	Kondisi Umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi Hutan Lindung</li> <li>- Sejarah terbentuknya KTH dan Izin IUPHKM</li> </ul>	Observasi dan Wawancara kepada, Ketua KTH Pundau Sipatuo



Data primer yang diperoleh dari para pemilik IUPHKm dengan melakukan wawancara kepada anggota kelompok tani Pundau Sipatuo berpedoman pada kuesioner. Jumlah anggota aktif KTH Pundau Sipatuo berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat tentang perubahan kepengurusan kelompok pada tanggal 1 September 2022 adalah 30 orang, Karena jumlah populasi relatif kecil maka penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu mengambil seluruh anggota aktif sebagai responden. Data sekunder diperoleh dari penelusuran laporan atau dokumen mengenai kondisi umum Desa Pundau dan data pendukung lainnya mengenai HKm di Desa Pundau Pundau.

Analisis data yang dipergunakan adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan kuantitatif dan untuk mengukur persepsi dan preferensi terhadap HKm dengan menggunakan skala likert. Skala Likert merupakan alat yang sering digunakan dalam penelitian sosial untuk mengukur sikap, opini, atau persepsi individu terhadap suatu pernyataan tertentu. Skala ini biasanya memiliki lima hingga tujuh tingkatan yang mencakup rentang dari "sangat setuju" hingga "sangat tidak setuju." Dalam konteks Hutan Kemasyarakatan (HKm), skala Likert dapat dimanfaatkan untuk menilai berbagai aspek, seperti manfaat ekonomi, keberlanjutan lingkungan, keadilan sosial, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan (Morizon, 2023).

#### 1. Pengukuran persepsi dan preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKm

Analisis data yang digunakan untuk mengukur persepsi dan preferensi terhadap pengelolaan HKm menggunakan *skala likert*. Morizon (2023) mengemukakan bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Pengukuran persepsi ini diukur menggunakan pernyataan positif yang terdiri dari 5 peringkat (Tabel 2).

Tabel 2. Skor kategori tingkat persepsi dan preferensi

No.	Kategori	Skor
1	Sangat Tidak Setuju/sangat kecil/sangat sulit/tidak aktif/tidak pernah/tidak berfungsi/tidak menyukai	1
2	Tidak Setuju/kecil/sulit/kurang aktif/jarang/lemah/kurang menyukai	2
3	Cukup Setuju/sedang/cukup mudah/cukup aktif/kadang/kadang/cukup kuat/cukup menyukai	3
4	Setuju/besar/tinggi/mudah/aktif/sering /kuat/menyukai	4
	/sangat besar/sangat tinggi/sangat mudah/sangat sering/sangat kuat/sangat menyukai	5



an persepsi dan preferensi menggunakan skala likert terhadap ekonomi, persepsi manfaat sosial, persepsi manfaat ekologi, terhadap model pengelolaan dan preferensi terhadap tujuan berdasarkan pada poin-poin yang ditanyakan menggunakan data

ordinal dan dianalisis dengan analisis frekuensi (proporsi) karena datanya berjenjang tanpa skor. Analisisnya menyajikan berupa frekuensi (banyaknya) atau proporsinya (persentase) dengan rumus berikut:

$$\text{Frekuensi (\%)} = (T_n / T) \times 100$$

Keterangan:

$T_n$  = Total jumlah responden yang memilih

$T$  = Total pilihan responden

Berikut adalah tabel indikator, data, kriteria dan skor persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap manfaat ekonomi HKM.

Tabel 3. Indikator, Kriteria Dan Skor Persepsi Terhadap Manfaat Ekonomi

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Peningkatan Pendapatan (Rakasiwi, 2021)	Tidak ada peningkatan pendapatan	1
		Peningkatan sangat Rendah (< Rp.1.500.000)	2
		Peningkatan sedang (Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000)	3
		Peningkatan besar (Rp2.500.001 – Rp3.500.00 / setara UMR)	4
		Peningkatan sangat besar (di atas Rp3.500.000)	5
2	Pembukaan Lapangan Kerja	Tidak membuka lapangan pekerjaan baru sama sekali	1
		Membuka sangat sedikit (hanya untuk diri sendiri/keluarga)	2
		Membuka beberapa lapangan kerja (1–3 orang)	3
		Membuka cukup banyak lapangan kerja (4–6 orang)	4
		Membuka banyak lapangan kerja (lebih dari 6 orang atau melibatkan komunitas lokal secara luas)	5
3	Akses Pasar Hasil Hutan	Tidak ada akses pasar / hasil tidak laku dijual	1
		Jarang laku dan hanya bisa dijual ke 1–2 pembeli tetap	2
		Bisa dijual namun pasar terbatas	3
		Cukup cepat terjual dengan beberapa pilihan pengepul	4
		Sangat cepat terjual, banyak pembeli/pengepul	5
4	Akses Finansial	Tidak memperoleh bantuan modal, ternak, bibit, atau alat produksi; seluruh kegiatan HKM dilakukan secara swadaya.	1
		Pernah menerima bantuan, namun tidak berkelanjutan dan hanya sebagian anggota yang menikmati.	2
		Mendapat bantuan dana atau barang dari pemerintah atau mitra, namun belum merata dan masih terbatas prosedurnya.	3
		Secara rutin menerima dukungan modal, bibit, atau sarana produktif dari program pemerintah atau kemitraan lokal.	4
		Memiliki kemitraan aktif dan berkelanjutan dengan lembaga keuangan, koperasi, atau CSR yang mendukung pembiayaan HKM.	5



Tabel berikut menyajikan indikator, data, kriteria, dan skor persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap manfaat sosial HKM sebagai dasar pengelompokan jawaban responden.

Tabel 4. Indikator, Kriteria Dan Skor Persepsi Terhadap Manfaat Sosial

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Partisipasi Sosial	Tidak pernah ikut kegiatan atau tidak tahu ada kegiatan HKM	1
		Jarang hadir atau hanya ikut saat diminta	2
		Hadir sesekali tapi belum berperan dalam pengambilan keputusan	3
		Sering hadir dan berkontribusi dalam kegiatan HKM	4
		Selalu hadir dan aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kelompok	5
2	Gotong Royong	Tidak pernah terlibat dalam gotong royong	1
		Hampir tidak pernah ikut meskipun ada kegiatan	2
		Terlibat jika diminta atau saat tersedia waktu	3
		Rutin terlibat dalam gotong royong	4
		Selalu terlibat tanpa diminta	5
3	Penguatan Kelembagaan Lokal	Tidak ada peran kelembagaan lokal	1
		Lembaga ada tapi kontribusinya sangat kecil	2
		Ada peran tapi belum optimal dalam kegiatan HKM	3
		Lembaga aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan	4
		Lembaga dominan, aktif dan rutin mengelola serta mengoordinasi kegiatan HKM	5

Tabel berikut menyajikan indikator, data, kriteria, dan skor persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap manfaat ekologi HKM sebagai acuan penilaian responden.

Tabel 5. Indikator, Kriteria Dan Skor Persepsi Terhadap Ekologi

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Kesadaran Terhadap Kelestarian	Tidak ada kesadaran, sering merusak (penebangan liar, pembakaran hutan, dll.)	1
		Kurang peduli, kadang ikut aktivitas merusak	2
		Cukup sadar tapi belum rutin bertindak nyata	3
		Rutin melakukan tindakan ramah lingkungan	4
		Aktif menjaga lingkungan, menyebarkan kesadaran	5
2	Partisipasi	Tidak pernah ikut serta atau menolak kegiatan pelestarian	1
		Jarang terlibat, minat rendah	2
		Pernah ikut tapi tidak rutin	3
		Rutin mengikuti kegiatan pelestarian oleh kelompok/lembaga	4
		Selalu terlibat dan berinisiatif dalam pelestarian secara aktif tanpa diminta	5



Selanjutnya, untuk mengukur preferensi anggota KTH terhadap model pengelolaan HKm, Tabel 6 menyajikan indikator, kriteria, dan skor yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penelitian ini.

Tabel 6. Indikator, Kriteria Dan Skor Preferensi Terhadap Model Pengelolaan HKm

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Bentuk Pengelolaan Yang Disukai	Tidak menyukai atau menolak seluruh bentuk pengelolaan HKm yang ditawarkan	1
		Kurang menyukai semua model karena dinilai tidak sesuai kebutuhan/kondisi masyarakat	2
		Cukup menyukai model konservasi meskipun tidak langsung memberi keuntungan ekonomi	3
		Menyukai model ekowisata karena manfaat ekonomi dan promosi lokal	4
		Sangat menyukai model agroforestri karena manfaat ekonomi dan ekologi	5

Untuk mengukur preferensi responden terhadap tujuan manfaat HKm, Tabel 7 menyajikan indikator, kriteria, dan skor yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penelitian ini, sehingga proses pengolahan data preferensi dapat dilakukan secara sistematis dan terarah.

Tabel 7. Indikator, Kriteria Dan Skor Preferensi Terhadap Tujuan Manfaat HKm

No	Indikator	Kriteria	Skor
1	Alasan Keterlibatan Dalam HKm	Tidak mendukung tujuan manfaat karena tidak relevan atau menguntungkan secara langsung	1
		Tidak terlalu mendukung, lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek	2
		Mendukung tujuan lingkungan meski tidak langsung menguntungkan	3
		Mendukung tujuan sosial seperti gotong royong dan kolaborasi	4
		Sangat mendukung tujuan ekonomi seperti peningkatan pendapatan dari hasil hutan atau kegiatan ekowisata	5



Setelah didapatkan skor kemudian dilakukan penafsiran tingkat persepsi dan pengelolaan HKm dengan menggunakan teknik statistik menghitung distribusi frekuensi dan persentase, dari skor persepsi responden. Skor total untuk masing-masing variabel diklasifikasikan dari berdasarkan rentang nilai yang telah ditentukan dengan berikut.

$$\text{Interval skor} = \frac{\text{Selisih Total Skor Tertinggi dengan total skor terendah}}{\text{Skor tertinggi}}$$

## 2. Uji Validitas dan Reliabilitas

Penelitian ini menerapkan uji validitas dan reliabilitas pada setiap butir pertanyaan untuk menilai persepsi dan preferensi masyarakat terhadap pengelolaan HKm. Uji validitas bertujuan memastikan bahwa setiap variabel dalam kuesioner benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud, sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat konsistensi dan keandalan hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Uji validitas dilakukan menggunakan koefisien korelasi Pearson, sementara uji reliabilitas dianalisis dengan koefisien Cronbach's Alpha, yang perhitungannya disajikan pada persamaan berikut.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[n(\sum X^2) - (\sum X)^2][n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2]}} \text{ (Persamaan Pearson)}$$

Keterangan :

- r = Nilai koefisien pearson
- x = Karakteristik responden
- y = Pertanyaan kuesioner
- n = Jumlah responden

$$Rac = \left(\frac{k}{k-1}\right) \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma t^2}\right] \text{ (Persamaan Cronbach's)}$$

Keterangan :

- r = Nilai koefisien Cronbach's)
- k = Banyaknya pertanyaan
- $\sum ab^2$  = Jumlah varian
- at = Varian total

Kriteria Uji :  $r_{hit} > r_{tabel(n-2,\alpha)}$  = variabel pertanyaan valid dan reliabel  
 $r_{hit} \leq r_{tabel(n-2,\alpha)}$  = variabel pertanyaan tidak valid dan reliabel

## 3. Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus berikut.



: TR – TC

: al Penerimaan

: al Cost

## 2.4 Hasil dan Pembahasan

### 2.4.1. Karakteristik Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Lokasi penelitian berada dalam areal izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pundau Sipatuo dengan luas  $\pm$  875 hektare. Kawasan ini termasuk dalam fungsi Hutan Lindung, sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.30/Menhut-II/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) kepada KTH Pundau Sipatuo. Secara administrasi Desa Pundau memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Desa Leppangan, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Mosso, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Paminggalang, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Limbua.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan dokumen Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKPS), kondisi umum kawasan didominasi oleh hutan sekunder, kebun campuran, dan lahan agroforestri yang dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan pemeliharaan ternak. Akses menuju Desa Pundau tergolong mudah karena dapat dijangkau melalui jalan desa dengan jarak sekitar  $\pm$ 10 km dari pusat Kecamatan Sendana.

Tutupan lahan di kawasan HKm Pundau Sipatuo tergolong heterogen. Komposisi lahan terdiri atas hutan sekunder seluas 131,2 hektare (15%), belukar tua 87,5 hektare (10%), belukar muda 43,7 hektare (5%), hutan tanaman 288,7 hektare (33%), dan lahan terbuka 323,5 hektare (37%). Dominasi lahan terbuka dan hutan tanaman menunjukkan bahwa kegiatan rehabilitasi dan penanaman masyarakat telah berjalan aktif, terutama dalam mendukung pemulihan tutupan hutan dan pengembangan usaha produktif berbasis hasil hutan.

Kondisi topografi kawasan HKm bervariasi dari datar hingga sangat curam. Sekitar 60% areal tergolong landai hingga agak curam dengan tingkat kemiringan antara 9–25%, sedangkan bagian datar mencakup 20%, area curam 10%, dan sangat curam 5% dari total luas kawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan sistem agroforestri dan penanaman campuran, sedangkan pada bagian curam dan sangat curam diperlukan penerapan teknik konservasi tanah dan air seperti terasering dan penanaman vegetasi penutup tanah.

Ketinggian tempat di kawasan HKm Pundau Sipatuo berkisar antara 150 hingga lebih dari 200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah pada ketinggian di atas 200 mdpl, sedangkan sisanya sekitar 150–200 mdpl. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah merupakan kawasan dataran tinggi yang berperan penting sebagai kawasan tangkapan air (catchment area) dan berfungsi melindungi ekosistem dan degradasi lahan. Kombinasi antara tutupan lahan, bentuk topografi, dan ketinggian menjadikan kawasan ini potensial untuk pengembangan



agroforestri, HHBK bernilai ekonomi, serta jasa lingkungan seperti wisata alam, perkemahan, dan pemandian air panas.

Berdasarkan dokumen Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (RKPS), potensi sumber daya hutan di wilayah ini terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan, sebagaimana disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Potensi Sumber Daya Hutan di Wilayah HKm Pundau Sipatuo

No.	Kategori	Jenis Potensi	Keterangan
1	Hasil Hutan Kayu	Jati, Cendana, Bitti, Pinus, dan jenis pohon keras lainnya	Potensi tegakan alami dan hasil penanaman
2	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Aren, Rotan, Madu Trigona, Kemiri, Jambu Mente, Kopi, Merica, dan hasil pertanian tumpangsari lainnya	Menjadi sumber utama pendapatan masyarakat
3	Jasa Lingkungan	Wisata air panas, lokasi perkemahan, dan pemandian alam	Berpotensi untuk pengembangan ekowisata berbasis masyarakat

Sumber: RKPS KTH Pundau Sipatuo 2018-2027.

Kawasan ini juga memiliki sumber daya air yang stabil sepanjang tahun serta tanah yang subur pada beberapa titik lereng. Kombinasi faktor biofisik dan sosial menjadikan HKm Pundau Sipatuo memiliki potensi tinggi untuk pengembangan ekowisata, agroforestri, dan HHBK bernilai ekonomi, sekaligus tetap menjaga fungsi lindung kawasan.

#### 2.4.2. Gambaran Umum Kelompok Tani Hutan (KTH) Pundau Sipatuo

Kelompok Tani Hutan (KTH) Pundau Sipatuo merupakan lembaga pengelola utama yang memperoleh izin IUPHKm berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.30/Menhut-II/2015. KTH ini beranggotakan masyarakat yang bermukim di sekitar Desa Pundau, dengan jumlah anggota aktif sekitar 30 orang yang terbagi dalam beberapa unit kegiatan usaha.

KTH Pundau Sipatuo dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan secara lestari, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) serta menjaga fungsi ekologis kawasan hutan lindung. Struktur kelembagaan kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa unit kegiatan usaha seperti unit madu trigona, kemiri, jambu mente, dan ternak



na yang dilakukan oleh kelompok meliputi:

1. hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kemiri, aren, jambu madu trigona.

2. Pengembangan sistem agroforestri untuk meningkatkan produktivitas lahan dan diversifikasi pendapatan.
3. Pemeliharaan dan rehabilitasi kawasan hutan lindung melalui penanaman pohon lokal bernilai konservasi.
4. Peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan dan pendampingan teknis yang difasilitasi oleh UPTD KPHL Unit X Malunda dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat.

Secara sosial, anggota KTH memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan semangat gotong royong yang tinggi, tercermin dari pola kerja kelompok dalam kegiatan produksi dan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa KTH Pundau Sipatuo berperan penting tidak hanya dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam memperkuat kelembagaan sosial masyarakat sekitar hutan.

KTH Pundau Sipatuo mengelola lima Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), yaitu KUPS Gara-gala, KUPS Beau, KUPS Peratu, KUPS Ayu Ranni, dan KUPS Wai Ariango, yang dirancang untuk mengembangkan berbagai unit usaha berbasis pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dari kelima KUPS tersebut, empat KUPS telah beroperasi dan berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi anggota, sedangkan KUPS Wai Ariango yang berorientasi pada pengembangan jasa lingkungan masih belum berjalan secara optimal. Selain pengembangan kelembagaan usaha, KTH Pundau Sipatuo juga telah memperoleh berbagai bentuk dukungan pemerintah, baik dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) maupun Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, yang mencakup bantuan sarana produksi dan penguatan kapasitas kelompok, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 9. Daftar Bantuan yang Telah Diperoleh KTH Pundau Sipatuo

No	Jenis Bantuan	Sumber	Tahun
1	Bang PeSoNa berupa rumah pengelolaan aren	BPSKL	2017
2	Tanaman MPTS berupa alpukat, merica, dan kopi	BPSKL	2018
3	Bang PeSoNa berupa ternak sapi dan kembang serta pakan ternak lamtoro dan gamal	BPSKL	2019
4	Bang PeSoNa berupa penanaman aren, jati putih, pala, dan alpukat	BPSKL	2021
5	Alat Ekonomi Produktif berupa alat sebanyak 6 unit	Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat	2022



Responden

dalam penelitian ini berjumlah 30 orang yang merupakan (KTH Pundau Sipatuo) di Desa Pundau, Kecamatan Sendana, Kabupaten

Majene. Karakteristik responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan keluarga, dan pekerjaan utama. Data lengkap karakteristik responden disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Karakteristik Responden Anggota KTH Pundau Sipatuo

Kategori	Subkategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Usia	20–35 tahun	6	20,00
	36–55 tahun	16	56,67
	>55 tahun	7	23,33
Jenis Kelamin	Laki-laki	25	83,33
	Perempuan	5	16,67
Pendidikan Terakhir	Tidak Sekolah	4	13,33
	SD	11	36,67
	SMP	6	20,00
	SMA	7	23,33
	Perguruan Tinggi	2	6,67
Jumlah Tanggungan	0–1 orang	10	33,33
	2–3 orang	12	40,00
	≥4 orang	8	26,67
Pekerjaan Utama	Petani	30	100,00

Berdasarkan Tabel 10, responden dengan rentang usia 36–55 tahun merupakan kelompok terbanyak yaitu sebanyak 16 orang (56,67%), diikuti oleh kelompok usia 20–35 tahun sebanyak 6 orang (20,00%) dan >55 tahun sebanyak 7 orang (23,33%). Responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 25 orang (83,33%), sedangkan perempuan sebanyak 5 orang (16,67%).

Tingkat pendidikan responden sebagian besar berada pada jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 11 orang (36,67%), diikuti oleh SMA sebanyak 7 orang (23,33%), SMP sebanyak 6 orang (20,00%), tidak bersekolah sebanyak 4 orang (13,33%), dan perguruan tinggi sebanyak 2 orang (6,67%). Jumlah tanggungan keluarga responden bervariasi, yaitu 12 orang (40,00%) memiliki 2–3 tanggungan, 10 orang (33,33%) memiliki 0–1 tanggungan, dan 8 orang (26,67%) memiliki ≥4 tanggungan.

Seluruh responden (100%) memiliki pekerjaan utama sebagai petani, dengan sumber pendapatan utama berasal dari kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti kemiri, madu trigona, aren, dan jambu mente, serta usaha peternakan sapi dan kambing.



Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Terhadap Pengelolaan Hutan  
Hutan

Anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap HKm diperoleh melalui  
kuesioner kepada 30 responden. Persepsi ini dibagi menjadi tiga  
persepsi terhadap ekonomi, sosial, dan ekologi.

#### 2.4.4. 1. Persepsi Ekonomi

Gambaran persepsi ekonomi anggota KTH terhadap peningkatan pendapatan, pembukaan lapangan pekerjaan, akses pasar dan akses finansial dari pengelolaan HKm dapat dilihat pada Tabel 11, Tabel 12, Tabel 13 dan Tabel 14, yang memuat kategori tingkat peningkatan pendapatan beserta skor, jumlah responden, dan persentase pada masing-masing kriteria.

Tabel 11. Persepsi Ekonomi Anggota KTH terhadap Peningkatan Pendapatan dari Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada peningkatan pendapatan	1	1	3,33
2	Peningkatan sangat Rendah (< Rp.1.500.000)	2	5	16,67
3	Peningkatan sedang (Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000)	3	13	43,33
4	Peningkatan besar (Rp2.500.001 – Rp3.500.00 / setara UMR)	4	8	26,67
5	Peningkatan sangat besar (di atas Rp3.500.000)	5	3	10,00

Tabel 11 memperlihatkan dominannya persepsi peningkatan pendapatan pada kategori sedang menunjukkan bahwa pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundau telah memberikan kontribusi ekonomi yang nyata bagi anggota KTH Pundau Sipatuo, meskipun tingkat manfaat yang dirasakan belum sepenuhnya merata. Sebanyak 43,33% responden berada pada kategori peningkatan sedang, diikuti oleh 26,67% responden yang merasakan peningkatan pendapatan besar, sementara hanya sebagian kecil (3,33%) yang tidak mengalami peningkatan. Pola ini mengindikasikan bahwa HKm telah berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat, tetapi dampaknya masih berbeda antar anggota kelompok.

Variasi pendapatan anggota KTH berkaitan erat dengan keberagaman sumber penghidupan yang dikembangkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat berasal dari berbagai komoditas, antara lain gula aren, kemiri, jambu mente, bawang merah, cabai rawit, jagung, madu trigona, serta ternak sapi dan kambing. Ternak, gula aren, dan kemiri menjadi sumber pendapatan utama karena optimal memanfaatkan ruang dan sumber daya dalam kawasan izin



Pola ini menunjukkan bahwa manfaat ekonomi HKm bersifat sistem usaha masyarakat yang telah ada, sejalan dengan Harun (2010) yang menyatakan bahwa kontribusi ekonomi perhutanan sosial berasal dari pemanfaatan kayu dan usaha turunan berbasis pengelolaan lahan.

Oleh karena itu, dominasi kategori peningkatan pendapatan sedang pada Tabel 11 menunjukkan bahwa HKm saat ini masih berperan sebagai sumber pendapatan masyarakat sebagai penghidupan utama rumah tangga. Kondisi ini

menunjukkan bahwa skala usaha dan intensitas pemanfaatan HKm belum sepenuhnya optimal. Oktoyoki dkk (2023) juga menegaskan bahwa manfaat ekonomi perhutanan sosial cenderung terbatas ketika kegiatan usaha masih berskala kecil dan belum terorganisasi dalam sistem usaha kolektif. Perbedaan persepsi peningkatan pendapatan antaranggota KTH mencerminkan adanya variasi kapasitas, skala usaha, serta tingkat keterlibatan dalam pemanfaatan sumber daya HKm, sebagaimana juga dikemukakan oleh Musdalifah dkk (2023) dalam kajian tentang dinamika kelembagaan kelompok tani hutan.

Tabel 12. Persepsi Ekonomi Anggota KTH terhadap Pembukaan Lapangan kerja dari Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak membuka lapangan pekerjaan baru sama sekali	1	1	3,33
2	Membuka sangat sedikit (hanya untuk diri sendiri/keluarga)	2	24	80,00
3	Membuka beberapa lapangan kerja (1–3 orang)	3	4	13,33
4	Membuka cukup banyak lapangan kerja (4–6 orang)	4	1	3,33
5	Membuka banyak lapangan kerja (lebih dari 6 orang atau melibatkan komunitas lokal secara luas)	5	0	0,00

Keterbatasan pembukaan lapangan pekerjaan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundau tercermin dari dominannya persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo pada kategori skala sangat kecil. Sebanyak 80,00% responden menyatakan bahwa kegiatan HKm hanya mampu menyediakan pekerjaan bagi diri sendiri atau keluarga, sementara 13,33% responden menilai adanya peluang kerja bagi 1–3 orang, dan hanya 3,33% yang merasakan pembukaan lapangan kerja dalam skala yang lebih luas. Tidak adanya responden yang menilai HKm mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar menunjukkan bahwa dampak HKm terhadap penyerapan tenaga kerja masih sangat terbatas.

Pola tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi yang berkembang dalam skema HKm masih didominasi oleh usaha berbasis rumah tangga, sehingga manfaatnya lebih bersifat individual dibandingkan kolektif. Aktivitas pengelolaan dan hutan cenderung dilakukan secara mandiri dengan skala usaha yang kecil, sehingga belum menghasilkan efek pengganda yang signifikan terhadap lapangan kerja di tingkat desa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketersediaan instrumen penciptaan lapangan kerja belum sepenuhnya



Temuan ini memperkuat hasil penelitian Harun (2024) yang menyatakan bahwa pada banyak lokasi perhutanan sosial, manfaat ekonomi pada tahap awal lebih banyak dinikmati oleh pelaku langsung, sementara kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal masih terbatas. Oktoyoki dkk (2023) juga menegaskan bahwa tanpa pengembangan unit usaha bersama dan penguatan kelembagaan ekonomi, skema perhutanan sosial, termasuk HKm, cenderung belum mampu menciptakan lapangan kerja baru dalam skala yang lebih luas.

Tabel 13. Persepsi Ekonomi Anggota KTH terhadap Akses Pasar dari Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada akses pasar / hasil tidak laku dijual	1	1	3,33
2	Jarang laku dan hanya bisa dijual ke 1–2 pembeli tetap	2	1	3,33
3	Bisa dijual namun pasar terbatas	3	2	6,67
4	Cukup cepat terjual dengan beberapa pilihan pengepul	4	25	83,33
5	Sangat cepat terjual, banyak pembeli/pengepul	5	1	3,33

Akses pasar hasil hutan dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundau secara umum dipersepsikan relatif baik oleh anggota KTH Pundau Sipatuo. Hal ini tercermin dari 83,33% responden yang menilai bahwa produk hasil hutan dapat terjual dengan cukup cepat melalui beberapa pilihan pembeli atau tengkulak. Sementara itu, hanya sebagian kecil responden yang menilai akses pasar masih terbatas atau belum optimal, yang menunjukkan bahwa secara umum hasil hutan dari kawasan HKm telah memiliki saluran pemasaran yang berjalan.

Kondisi tersebut tidak terlepas dari dukungan sarana produksi dan distribusi yang tersedia di tingkat kelompok. Hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan motor roda tiga berperan penting dalam mempermudah mobilitas dan distribusi produk ke pasar, sehingga mengurangi hambatan jarak dan waktu. Selain itu, beberapa komoditas seperti gula aren dan madu trigona memiliki karakteristik pasar yang cukup spesifik, di mana penjualan dapat dilakukan langsung dari rumah produsen tanpa melalui rantai pemasaran yang panjang. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi juga mulai berkontribusi dalam memperluas jangkauan pemasaran dan mempertemukan produsen dengan konsumen secara lebih



memperkuat hasil penelitian Musdalifah dkk (2023) yang kemudahan akses pasar serta dukungan sarana distribusi penting dalam meningkatkan manfaat ekonomi perhutanan sosial. sebagaimana ditegaskan oleh Oktoyoki dkk (2023), akses pasar umum selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan

apabila posisi tawar produsen masih lemah, sehingga penguatan kelembagaan dan strategi pemasaran kolektif tetap diperlukan.

Tabel 14. Persepsi Ekonomi Anggota KTH terhadap Akses Finansial dari Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak memperoleh bantuan modal, ternak, bibit, atau alat produksi; seluruh kegiatan HKm dilakukan secara swadaya.	1	0	0,00
2	Pernah menerima bantuan, namun tidak berkelanjutan dan hanya sebagian anggota yang menikmati.	2	1	3,33
3	Mendapat bantuan dana atau barang dari pemerintah atau mitra, namun belum merata dan masih terbatas prosedurnya.	3	29	96,67
4	Secara rutin menerima dukungan modal, bibit, atau sarana produktif dari program pemerintah atau kemitraan lokal.	4	0	0,00
5	Memiliki kemitraan aktif dan berkelanjutan dengan lembaga keuangan, koperasi, atau CSR yang mendukung pembiayaan HKm.	5	0	0,00

Akses finansial dan bantuan dalam pengelolaan HKm di Desa Pundau dipersepsikan tersedia oleh sebagian besar anggota KTH Pundau Sipatuo, namun belum bersifat merata dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari dominasi 96,67% responden yang menyatakan bahwa bantuan telah diterima, tetapi masih terbatas dalam cakupan dan prosedurnya. Tidak adanya responden yang menilai adanya dukungan rutin atau kemitraan pembiayaan jangka panjang menunjukkan bahwa akses finansial HKm masih bersifat temporer dan belum terlembagakan secara kuat. Kondisi ini menegaskan bahwa keberadaan bantuan lebih berfungsi sebagai pemicu awal kegiatan, bukan sebagai sistem pendukung yang berkelanjutan.

Persepsi tersebut sejalan dengan riwayat bantuan yang diterima oleh KTH Pundau Sipatuo, yang umumnya bersifat periodik dan berbasis program. Bantuan meliputi pembangunan sarana pengolahan aren, penyediaan bantuan ternak dan pakan hijauan, penanaman komoditas, penyediaan alat ekonomi produktif berupa motor roda tiga. Dukungan ini berperan penting dalam memulai dan menopang kegiatan, namun belum terintegrasi dengan skema pembiayaan jangka panjang. Kemitraan dengan koperasi, lembaga keuangan formal, maupun program tanggung jawab sosial (CSR).



Temuan ini memperkuat hasil penelitian Musdalifah dkk (2023) yang menyatakan bahwa bantuan pemerintah dalam skema perhutanan sosial umumnya masih berorientasi pada pendekatan proyek, sehingga lebih efektif dalam meningkatkan kapasitas awal dibandingkan mendorong kemandirian finansial kelompok. Harun (2024) juga menegaskan bahwa tanpa pendampingan yang konsisten dan akses terhadap pembiayaan berkelanjutan, manfaat ekonomi HKm cenderung mengalami stagnasi meskipun dukungan sarana dan prasarana telah diberikan.

#### 2.4.4. 2. Persepsi Sosial

Hasil penilaian responden terhadap aspek sosial pengelolaan HKm terhadap partisipasi sosial, gotong royong, dan kelembagaan lokal ditampilkan pada Tabel 15 hingga Tabel 17 dalam bentuk kategori kriteria, skor, jumlah responden, serta persentase.

Tabel 15. Persepsi Sosial Anggota KTH terhadap Partisipasi Sosial dalam Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak pernah ikut kegiatan atau tidak tahu ada kegiatan HKm	1	0	0,00
2	Jarang hadir atau hanya ikut saat diminta	2	4	13,33
3	Hadir sesekali tapi belum berperan dalam pengambilan keputusan	3	10	33,33
4	Sering hadir dan berkontribusi dalam kegiatan HKm	4	10	33,33
5	Selalu hadir dan aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kelompok	5	6	20,00

Partisipasi sosial anggota KTH Pundau Sipatuo dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) menunjukkan kecenderungan yang cukup baik, terutama pada tingkat kehadiran dan keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini tercermin dari proporsi responden yang sering hadir (33,33%) dan selalu aktif dalam perencanaan serta pelaksanaan kegiatan kelompok (20,00%), sementara tidak terdapat responden yang sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan HKm. Di sisi lain, 33,33% responden yang hanya hadir sesekali tanpa terlibat dalam pengambilan keputusan, serta 13,33% yang jarang hadir, menunjukkan tingkat keterlibatan antaranggota yang rendah.



sebut mengindikasikan bahwa partisipasi sosial di tingkat yang lebih rendah dibandingkan partisipasi pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan kata lain, keterlibatan anggota dalam kegiatan yang bersifat partisipasi fungsional, sementara partisipasi substantif

dalam proses perencanaan dan penentuan arah pengelolaan HKm masih belum merata. Kondisi ini mencerminkan dinamika umum dalam kelembagaan berbasis masyarakat, di mana kehadiran dan kontribusi tenaga sering kali mendahului keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis.

Temuan ini menguatkan pandangan Basir dkk (2020) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, partisipasi sosial umumnya berkembang secara bertahap, dimulai dari keterlibatan dalam aktivitas kelompok sebelum bertransformasi menjadi partisipasi yang lebih mendalam dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, persepsi positif terhadap partisipasi sosial di KTH Pundau Sipatuo menunjukkan adanya fondasi partisipatif yang cukup kuat, namun tetap memerlukan penguatan mekanisme internal agar keterlibatan anggota tidak hanya terfokus pada kehadiran dan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mencakup peran yang lebih aktif dalam pengambilan keputusan kelompok.

Tabel 16. Persepsi Sosial Anggota KTH terhadap Gotong Royong dalam Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak pernah terlibat dalam gotong royong	1	0	0,00
2	Hampir tidak pernah ikut meskipun ada kegiatan	2	4	13,33
3	Terlibat jika diminta atau saat tersedia waktu	3	11	36,67
4	Rutin terlibat dalam gotong royong	4	8	26,67
5	Selalu terlibat tanpa diminta	5	7	23,33

Praktik gotong royong dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Pundau menunjukkan tingkat penguatan sosial yang relatif baik di kalangan anggota KTH Pundau Sipatuo. Hal ini tercermin dari proporsi responden yang rutin terlibat dalam gotong royong (26,67%) dan selalu terlibat tanpa diminta (23,33%), sementara tidak terdapat responden yang sama sekali tidak pernah berpartisipasi. Meskipun demikian, masih terdapat 36,67% responden yang terlibat secara situasional yakni ketika diminta atau saat memiliki waktu luang—serta 13,33% yang hampir tidak pernah terlibat, menunjukkan adanya variasi intensitas keterlibatan antaranggota.

Pola tersebut mengindikasikan bahwa gotong royong telah menjadi praktik yang sudah ada, namun belum sepenuhnya merata dalam hal konsistensi. Hal ini sejalan dengan indikator partisipasi sosial yang menekankan aspek keterlibatan dalam kegiatan formal, indikator gotong royong merefleksikan partisipasi situasional yang langsung mendukung aktivitas pengelolaan HKm. Di Desa Pundau Sipatuo, praktik gotong royong—termasuk pola kerja gotong royong secara lokal sebagai sibalibali—berperan penting dalam



memperlancar pengelolaan lahan, pemeliharaan tanaman, serta usaha ternak di kawasan HKm.

Temuan ini memperkuat pandangan Basir dkk (2020) yang menegaskan bahwa gotong royong merupakan elemen utama modal sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tingginya keterlibatan anggota dalam kerja kolektif mencerminkan adanya kepercayaan dan solidaritas internal yang menopang keberlanjutan kelembagaan kelompok. Namun demikian, masih ditemukannya keterlibatan yang bersifat situasional menunjukkan perlunya penguatan komitmen bersama dan pembagian peran yang lebih jelas agar praktik gotong royong dapat berlangsung lebih konsisten dan merata di antara seluruh anggota kelompok.

Tabel 17. Persepsi Sosial Anggota KTH terhadap Kelembagaan Lokal dalam Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada peran kelembagaan lokal	1	0	0,00
2	Lembaga ada tapi kontribusinya sangat kecil	2	3	10,00
3	Ada peran tapi belum optimal dalam kegiatan HKm	3	12	40,00
4	Lembaga aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan	4	12	40,00
5	Lembaga dominan, aktif dan rutin mengelola serta mengoordinasi kegiatan HKm	5	3	10,00

Penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan Hkm di Desa Pundau dipersepsikan berada pada tingkat cukup hingga baik oleh anggota KTH Pundau Sipatuo. Hal ini tercermin dari distribusi penilaian yang relatif seimbang, di mana 40,00% responden menilai kelembagaan telah aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan HKm, sementara 40,00% responden lainnya menilai peran kelembagaan sudah ada tetapi belum berjalan secara optimal. Proporsi responden yang menilai kontribusi kelembagaan masih sangat kecil dan yang menilai kelembagaan telah dominan masing-masing hanya 10,00%, serta tidak terdapat responden yang menyatakan tidak adanya peran kelembagaan sama sekali. Distribusi ini menunjukkan bahwa secara umum keberadaan dan fungsi kelembagaan telah diakui oleh anggota kelompok.



Pola tersebut mengindikasikan bahwa kelembagaan KTH Pundau Sipatuo berfungsi, namun kapasitas dan efektivitasnya masih berada di tingkat yang rendah. Peran kelembagaan sudah tampak dalam kegiatan kelompok, pengambilan keputusan, serta koordinasi kegiatan, tetapi belum sepenuhnya mampu mengelola seluruh aspek kegiatan secara optimal dan berkelanjutan, khususnya dalam hal pembagian peran dan penguatan kapasitas anggota. Kondisi ini mencerminkan

bahwa kelembagaan lokal telah menjadi wadah kolektif yang berjalan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek manajerial dan fungsional.

Temuan ini sejalan dengan Musdalifah dkk (2023) yang menyatakan bahwa kelembagaan kelompok tani hutan pada umumnya telah terbentuk secara formal, tetapi masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas manajerial, pengelolaan usaha, dan konsolidasi anggota. Oktalina dkk (2022) juga menegaskan bahwa kekuatan kelembagaan lokal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi, melainkan oleh kemampuan lembaga dalam memfasilitasi partisipasi anggota, mengelola konflik internal, serta menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Dengan demikian, persepsi positif terhadap peran kelembagaan di KTH Pundau Sipatuo menunjukkan fondasi kelembagaan yang telah terbentuk, namun masih memerlukan penguatan agar mampu berperan lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan pengelolaan HKM.

#### 2.4.4. 3. Persepsi Ekologi

Uraian persepsi Ekologi anggota KTH terkait kesadaran terhadap kelestarian hutan dan partisipasi dalam pelestarian hutan disajikan pada Tabel 18 dan Tabel 19, yang memuat kriteria penilaian beserta skor, jumlah responden, dan persentase pada masing-masing kategori.

Tabel 18. Persepsi Ekologi Anggota KTH terhadap Kesadaran Terhadap Kelestarian dalam Pengelolaan HKM

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak ada kesadaran, sering merusak (penebangan liar, pembakaran hutan, dll.)	1	0	0,00
2	Kurang peduli, kadang ikut aktivitas merusak	2	1	3,33
3	Cukup sadar tapi belum rutin bertindak nyata	3	13	43,33
4	Rutin melakukan tindakan ramah lingkungan	4	12	40,00
5	Aktif menjaga lingkungan, menyebarkan kesadaran	5	4	13,33

Kesadaran terhadap kelestarian lingkungan di kalangan anggota KTH menunjukkan kecenderungan cukup baik, yang tercermin dari responden. Sebagian besar responden berada pada kategori belum rutin bertindak (43,33%) dan rutin melakukan tindakan ramah lingkungan (40,00%), sementara 13,33% responden telah menunjukkan kepedulian yang lebih tinggi dengan aktif menjaga lingkungan dan menyebarkan kesadaran terhadap nilai kelestarian. Hanya sebagian kecil (3,33%) yang menunjukkan kepedulian rendah, serta tidak terdapat responden dengan



persepsi sangat buruk terhadap kelestarian lingkungan. Pola ini menunjukkan bahwa nilai-nilai konservasi telah dipahami oleh mayoritas anggota kelompok, meskipun intensitas penerapannya dalam praktik sehari-hari masih beragam.

Distribusi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan HKm di Desa Pundau berada pada fase transisi dari kesadaran normatif menuju tindakan nyata. Kesadaran ekologis tidak lagi terbatas pada pemahaman konseptual mengenai pentingnya kelestarian hutan, tetapi mulai diterjemahkan ke dalam perilaku ramah lingkungan, meskipun belum sepenuhnya konsisten di seluruh anggota. Kondisi ini merupakan dinamika yang lazim dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat, di mana perubahan perilaku konservasi berkembang secara bertahap seiring dengan pengalaman pengelolaan dan penguatan kapasitas kelompok.

Temuan ini menguatkan pandangan Pambudi (2020) yang menyatakan bahwa pemberian akses legal melalui skema perhutanan sosial dapat meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat karena tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap kawasan hutan. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Oktalina dkk (2022), tingkat kesadaran ekologis yang relatif tinggi belum selalu berbanding lurus dengan konsistensi tindakan konservasi apabila tidak diiringi dengan penguatan kelembagaan dan penyediaan insentif yang memadai. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran ekologis di KTH Pundau Sipatuo perlu terus didukung oleh mekanisme kelembagaan agar dapat terinternalisasi secara lebih konsisten dalam praktik pengelolaan HKm.

Tabel 19. Persepsi Ekologi Anggota KTH terhadap Partisipasi Dalam Pelestarian Hutan dalam Pengelolaan HKm

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak pernah ikut serta atau menolak kegiatan pelestarian	1	0	0,00
2	Jarang terlibat, minat rendah	2	2	6,67
3	Pernah ikut tapi tidak rutin	3	11	36,67
4	Rutin mengikuti kegiatan pelestarian oleh kelompok/lembaga	4	15	50,00
5	Selalu terlibat dan berinisiatif dalam pelestarian secara aktif tanpa diminta	5	2	6,67

Partisipasi anggota KTH Pundau Sipatuo dalam kegiatan pelestarian hutan menunjukkan kecenderungan cukup hingga baik, terutama pada keterlibatan dalam kegiatan yang diselenggarakan secara kolektif. Hal ini tercermin dari 50,00%



nyatakan rutin mengikuti kegiatan pelestarian yang difasilitasi lembaga terkait, serta 36,67% responden yang pernah terlibat melakukannya secara konsisten. Sementara itu, hanya 6,67% yang terlibat, dan tidak terdapat responden yang menolak atau pernah mengikuti kegiatan pelestarian. Distribusi ini menunjukkan

bahwa pelestarian hutan telah menjadi bagian dari aktivitas kelompok, meskipun tingkat keterlibatan antaranggota masih bervariasi.

Pola partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa keterlibatan anggota KTH dalam kegiatan pelestarian masih didominasi oleh partisipasi responsif, yakni mengikuti kegiatan yang diinisiasi oleh kelompok atau pendamping, dibandingkan partisipasi yang sepenuhnya didorong oleh inisiatif individual. Rendahnya proporsi responden yang selalu terlibat dan berinisiatif secara mandiri (6,67%) menunjukkan bahwa meskipun kesadaran ekologis telah terbentuk, internalisasi nilai pelestarian ke dalam tindakan mandiri masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan tahap perkembangan partisipasi pelestarian yang masih bergantung pada keberadaan struktur dan aktivitas kolektif.

Temuan ini menguatkan pandangan Oktalina dkk (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi pelestarian dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat umumnya tumbuh seiring dengan penguatan kelembagaan dan tersedianya mekanisme kegiatan kolektif yang terorganisir. Mukhtiya dkk (2023) juga menegaskan bahwa keterlibatan rutin masyarakat dalam kegiatan konservasi merupakan indikator awal keberhasilan perhutanan sosial, sementara peningkatan inisiatif individu membutuhkan proses pembelajaran, pendampingan, dan penguatan kelembagaan yang berkelanjutan.

Setelah dilakukan skoring pada setiap kategori persepsi, hasil penilaian tersebut kemudian direkapitulasi untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat persepsi anggota KTH terhadap pengelolaan HKM di Desa Pundau. Rekapitulasi ini memudahkan identifikasi kecenderungan persepsi responden berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh. Hasil rekapitulasi nilai persepsi selengkapnya disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Rekapitulasi Nilai Persepsi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau

Nilai Persepsi	Kategori Tingkat Persepsi	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
> 16	Sangat Buruk	0	0,00
16 – 22	Buruk	2	6,67
23 – 29	Sedang	12	40,00
30 – 36	Baik	11	36,67
> 36	Sangat Baik	5	16,67
Total		30	100,00

Rekapitulasi nilai persepsi menunjukkan bahwa persepsi anggota KTH adap pengelolaan HKM secara umum berada pada kategori 0,00% responden berada pada kategori persepsi sedang dan 16,67% responden berada pada kategori persepsi baik, sementara 36,67% responden yang berada pada kategori buruk, dan tidak terdapat responden yang berada pada kategori sangat buruk. Pola ini mengindikasikan bahwa KTH memiliki penilaian positif terhadap pelaksanaan HKM di



Dominannya persepsi responden pada kategori sedang dan baik menunjukkan bahwa pengelolaan HKm di Desa Pundau telah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat pada aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, serta dipandang tidak hanya sebagai akses pemanfaatan lahan, tetapi juga sebagai ruang penguatan penghidupan, pembelajaran bersama, dan pengelolaan sumber daya secara kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan HKm memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan anggota KTH sekaligus mendorong terbentuknya tata kelola yang lebih partisipatif. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya merata karena adanya perbedaan kapasitas anggota, intensitas keterlibatan dalam kegiatan kelompok, serta variasi akses terhadap sumber daya, informasi, dan peluang usaha yang menyebabkan tingkat pemanfaatan HKm berbeda antaranggota.

Hasil ini sesuai dengan indikator sebelumnya, di mana manfaat ekonomi yang diperoleh anggota KTH umumnya masih bersifat tambahan dan belum menjadi sumber pendapatan utama yang stabil, meskipun berpotensi dikembangkan melalui peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha. Pada aspek sosial, persepsi responden cenderung lebih kuat karena adanya kerja sama, gotong royong, serta keterlibatan anggota dalam kegiatan pengelolaan yang memperkuat solidaritas dan kelembagaan kelompok. Sementara itu, pada aspek ekologi, persepsi yang berkembang menunjukkan meningkatnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga fungsi hutan dan keberlanjutan sumber daya, meskipun penerapan praktik ramah lingkungan masih memerlukan penguatan agar lebih konsisten, terencana, dan berkelanjutan. Dengan demikian, dominasi kategori sedang dan baik dapat diartikan bahwa pengelolaan HKm berada pada arah yang positif, tetapi masih membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas, pendampingan, serta pemerataan akses agar manfaatnya semakin optimal dan dirasakan lebih luas oleh seluruh anggota KTH.

Temuan ini sejalan dengan Harun (2024) yang menyatakan bahwa persepsi masyarakat terhadap program perhutanan sosial umumnya berada pada spektrum menengah–positif pada tahap implementasi awal hingga menengah, terutama ketika akses kelola telah diberikan namun penguatan usaha dan kelembagaan masih berlangsung. Oktalina dkk (2022) juga menegaskan bahwa persepsi positif masyarakat merupakan prasyarat penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, meskipun tidak selalu langsung berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

#### 2.4.5. Preferensi Anggota Kelompok Tani Hutan Terhadap Hutan Kemasyarakatan



Anggota KTH terhadap HKm merupakan aspek penting untuk dukungan pilihan masyarakat dalam menentukan bentuk orientasi pemanfaatan kawasan. Preferensi ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan anggota KTH dalam menjalankan praktik dari sisi teknis pengelolaan maupun tujuan manfaat yang

#### 2.4.2. 1. Preferensi terhadap Model Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Preferensi anggota KTH terhadap model pengelolaan HKM di Desa Pundau disajikan pada Tabel 21, yang memuat pilihan model pengelolaan yang dipilih responden beserta jumlah dan persentase pada setiap kategori. Penyajian ini memberikan gambaran mengenai kecenderungan model pengelolaan yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anggota KTH di Desa Pundau.

Tabel 21. Preferensi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap Model Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak menyukai atau menolak seluruh bentuk pengelolaan HKM yang ditawarkan	1	0	0,00
2	Kurang menyukai semua model karena dinilai tidak sesuai kebutuhan/kondisi masyarakat	2	0	0,00
3	Cukup menyukai model konservasi meskipun tidak langsung memberi keuntungan ekonomi	3	0	0,00
4	Menyukai model ekowisata karena manfaat ekonomi dan promosi lokal	4	1	3,33
5	Sangat menyukai model agroforestri karena manfaat ekonomi dan ekologi	5	29	96,67

Preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap model pengelolaan HKM menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat pada model agroforestri. Sebanyak 96,67% responden menyatakan sangat menyukai model tersebut, sementara hanya 3,33% yang memilih model ekowisata, dan tidak terdapat responden yang menyatakan ketidaksukaan terhadap seluruh bentuk pengelolaan HKM maupun memilih model konservasi murni. Distribusi ini memperlihatkan adanya kesepahaman yang tinggi di tingkat kelompok mengenai model pengelolaan yang dianggap paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Rendahnya preferensi terhadap model ekowisata tidak mencerminkan sikap



lebih menunjukkan keterbatasan pengalaman dan manfaat pemanfaatan lapangan mengungkapkan bahwa ekowisata yang responden merujuk pada potensi wisata air panas alami di sekitar kawasan sosial. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum menjadi kegiatan utama dan belum memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi sebagian besar anggota kelompok, sehingga belum menjadi pilihan model pengelolaan HKM.

Sebaliknya, kuatnya preferensi terhadap agroforestri selaras dengan praktik pengelolaan yang telah berjalan di lapangan, yaitu pola agroforestri yang terintegrasi dengan usaha ternak (*agrosilvopastura*). Pola ini memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi yang relatif lebih pasti dan berkelanjutan melalui kombinasi tanaman kehutanan, tanaman pertanian, serta ternak sapi dan kambing yang memanfaatkan ruang dan sumber daya kawasan HKm. Dengan demikian, pilihan model pengelolaan didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan pengalaman empiris, bukan semata-mata pada potensi alternatif yang masih bersifat laten.

Temuan ini menguatkan pandangan Widiarta dkk (2023) yang menyatakan bahwa masyarakat perhutanan sosial cenderung memprioritaskan model pengelolaan yang mampu memberikan manfaat ekonomi langsung dan relatif stabil. Sementara itu, pengembangan ekowisata umumnya memerlukan investasi awal, pengelolaan kelembagaan yang lebih kompleks, serta dukungan akses pasar yang memadai. Oleh karena itu, meskipun ekowisata air panas memiliki potensi pengembangan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa model tersebut belum menjadi preferensi utama dalam pengelolaan HKm di Desa Pundau.

#### 2.4.2. 2. Preferensi terhadap Tujuan Manfaat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan

Preferensi anggota KTH terhadap tujuan manfaat pengelolaan HKm di Desa Pundau disajikan pada Tabel 22, yang memuat kategori tujuan manfaat pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan beserta jumlah serta persentase responden. Data ini menunjukkan kecenderungan prioritas manfaat yang diharapkan masyarakat sebagai dasar perumusan arah pengelolaan HKm yang lebih sesuai kebutuhan anggota KTH.

Tabel 22. Preferensi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap Tujuan Manfaat Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau

No.	Kriteria	Skor	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Tidak mendukung tujuan manfaat karena tidak relevan atau menguntungkan secara langsung	1	0	0,00
2	Tidak terlalu mendukung, lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek	2	0	0,00
3	Mendukung tujuan lingkungan meski tidak langsung menguntungkan	3	0	0,00
	tujuan sosial seperti rg dan kolaborasi	4	0	0,00
	dukung tujuan ekonomi rgkatan pendapatan dari atau kegiatan ekowisata	5	30	100,00



Preferensi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap tujuan manfaat pengelolaan HKm menunjukkan orientasi yang sangat kuat dan homogen pada tujuan ekonomi. Seluruh responden (100,00%) menyatakan sangat mendukung tujuan ekonomi, seperti peningkatan pendapatan dari hasil hutan dan kegiatan pendukung lainnya, tanpa adanya responden yang memilih tujuan lingkungan, sosial, maupun menunjukkan sikap kurang mendukung. Pola ini mencerminkan adanya kesepahaman kolektif yang jelas mengenai tujuan utama keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan HKm.

Dominasi preferensi terhadap tujuan ekonomi mengindikasikan bahwa kebutuhan peningkatan kesejahteraan rumah tangga menjadi faktor pendorong utama partisipasi masyarakat dalam HKm. Temuan ini selaras dengan hasil pada indikator persepsi ekonomi dan preferensi model pengelolaan, di mana masyarakat memprioritaskan model agroforestri–agrosilvopastura yang memberikan manfaat ekonomi langsung dan relatif stabil. Dengan demikian, tujuan ekonomi dipersepsikan sebagai prasyarat mendasar bagi keberlanjutan keterlibatan masyarakat, sekaligus sebagai basis bagi penguatan dimensi sosial dan ekologis dalam jangka panjang.

Temuan ini menguatkan pandangan Harun (2024) yang menegaskan bahwa keberhasilan perhutanan sosial sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, kuatnya preferensi terhadap tujuan ekonomi dalam konteks KTH Pundau Sipatuo tidak dapat dimaknai sebagai pengabaian aspek sosial dan ekologi, melainkan sebagai refleksi urutan prioritas kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan HKm.

Setelah preferensi responden pada setiap kategori dianalisis, langkah selanjutnya adalah menyusun rekapitulasi nilai untuk memperoleh gambaran umum mengenai tingkat preferensi anggota KTH terhadap pengelolaan HKm di Desa Pundau. Rekapitulasi ini merangkum akumulasi skor preferensi sehingga memudahkan penentuan kategori tingkat preferensi secara keseluruhan. Hasil rekapitulasi nilai preferensi tersebut disajikan pada Tabel 23.

Tabel 23. Rekapitulasi Nilai Preferensi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) terhadap Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Pundau

Nilai Preferensi	Kategori Tingkat Preferensi	Jumlah Responden (orang)	Persentase (%)
< 4	Sangat Rendah	0	0,00
4 – 5	Rendah	0	0,00
6 – 7	Sedang	0	0,00
8 – 9	Tinggi	1	3,33
> 9	Sangat Tinggi	29	96,67
		30	100,00



nilai preferensi menunjukkan bahwa preferensi anggota KTH adap pengelolaan HKm berada pada kategori sangat tinggi. 33% responden termasuk dalam kategori preferensi sangat tinggi, 33% responden berada pada kategori tinggi. Tidak terdapat preferensi sedang, rendah, maupun sangat rendah. Pola ini

menunjukkan bahwa tingkat penerimaan dan kesesuaian pengelolaan HKM dengan kebutuhan serta harapan masyarakat sangat kuat dan hampir merata.

Tingginya tingkat preferensi ini mencerminkan bahwa model dan tujuan pengelolaan HKM yang dijalankan dinilai relevan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Desa Pundau. Preferensi yang sangat tinggi tersebut selaras dengan temuan pada indikator preferensi model pengelolaan, di mana masyarakat secara dominan memilih agroforestri–agrosilvopastura, serta pada indikator preferensi tujuan manfaat yang sepenuhnya berorientasi pada peningkatan pendapatan. Dengan demikian, preferensi yang tinggi tidak bersifat abstrak, melainkan berakar pada pengalaman empiris masyarakat dalam memanfaatkan kawasan HKM.

Hasil ini sejalan dengan Harun (2024) yang menyatakan bahwa preferensi masyarakat terhadap perhutanan sosial cenderung meningkat ketika skema pengelolaan mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata dan fleksibilitas dalam pemanfaatan sumber daya.

## 2.5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Persepsi anggota KTH Pundau Sipatuo terhadap pengelolaan HKM berada pada kategori sedang hingga baik, dengan manfaat ekonomi sebagai aspek yang paling dominan dirasakan, meskipun HKM belum menjadi sumber penghidupan utama.
2. Dari aspek sosial dan ekologi, partisipasi, gotong royong, serta kesadaran pelestarian hutan telah terbentuk dengan cukup baik, namun keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan inisiatif individu masih perlu diperkuat.
3. Preferensi masyarakat terhadap pengelolaan HKM berada pada kategori sangat tinggi, dengan model agroforestri–agrosilvopastura dan tujuan manfaat ekonomi sebagai pilihan utama karena dinilai paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

## 2.6 Daftar Pustaka

Basir, B. N., Dassir, M., & Makkarennu, M. (2020a). Peran Struktur Sosial Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Desa Betao Riase. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.24259/jhm.v12i1.9210>

Harun, A. C. M. (2024). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Hutan Kawasan Alam Lestari Resort Jangkok KPH Rinjani Barat. *Hutan* (2), 371–381. <https://doi.org/10.36873/jht.v19i2.17068>



Developing a Sustainable Community Forest Management the Mountainous Areas of Tanggamus, Lampung, Indonesia. *s Journal of Biological Diversity*, 24(8). [rg/10.13057/biodiv/d240831](https://doi.org/10.13057/biodiv/d240831)

- Mukhtiya, L. A., Marwoto, M., & Hamzah, H. (2023). Persepsi dan Partisipasi Anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam Pelaksanaan Agroforestri di Areal Kemitraan PT Restorasi Ekosistem Indonesia Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 2609. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4276>
- Musdalifah, Yusran, & Adrayanti Sabar. (2023). Tata Kelola Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Malaka 01 Hutan Kemasyarakatan di Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros. *Jurnal Kehutanan Papuaasia*, 9(1), 18–28. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapausia.vol9.iss1.424>
- Oktalina, S. N., Suka, A. P., Bisjoe, A. R. H., & Muin, N. (2022). Understanding Social Capital in Management of Community Forest in Indonesia, 33(2), 153–165. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2022.033.2.16>
- Oktoyoki, H., Windari, E. H., Pratama, B., & Ansiska, P. (2023). Post-permit social forestry: An analysis of the economic impact of the forestry revolving fund facility to the community of forest farmers. *E3S Web of Conferences*, 373, 5007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202337305007>
- Pambudi, A. S. (2020b). The Development of Social Forestry in Indonesia: *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i1.11>
- Widiarta, I. K. A., Darmawan, D. P., & Susrusa, K. B. (2023). Keberlanjutan Sistem Agroforestri Berbasis Kopi Di Hutan Kemasyarakatan Desa Wanagiri Kabupaten Buleleng. *Jurnal Manajemen Agribisnis (Journal of Agribusiness Management)*, 11(01), 88. <https://doi.org/10.24843/jma.2023.v11.i01.p08>
- Zamrodah, Y., & Prayudhi, L. A. (2024). Analisis Persepsi Masyarakat Sekitar Hutan Produksi Tetap Terhadap Program Perhutanan Sosial (Studi Kasus Lmdh Jati Jaya Desa Salamrejo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar). *Jurnal Viabel Pertanian Vol. 18 No. 2 November 2024*, 18(2), 88–98.

